

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, KOMITMEN ORGANISASI, PARTISIPASI MASYARAKAT, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
(Studi Survei pada Kantor Balai Desa di seluruh Kabupaten Bantul)**

Ninda Anggita Eprillia

[nindaanggita1@gmail.com](mailto:nindaanggita1@gmail.com)

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dosen Pembimbing

**Evy Rahman Utami, S.E., M.Sc**

***ABSTRACT***

*This study aims to obtain empirical evidence about the influence of village apparatus competence, organizational commitment, community participation, information technology, and the role of village officials on village financial management accountability. The problem in this study is the case of misuse of development funds worth Rp 306,959,000 with a total of 17 development projects. The subject of this study was the village apparatus consisting of the village head, village secretary and village treasurer throughout Bantul Regency. This study uses a probability sampling technique. This research method uses survey methods and the data used are primary data by distributing questionnaires to 75 villages with 225 respondents. Hypothesis testing uses multiple regression using SPSS v.15. Hypothesis testing results from this study indicate the competence of village officials, organizational commitment and the role of village officials influence the accountability of village financial management. Public participation and information technology have no effect on village financial management accountability.*

**Keywords:** *Organizational Commitment, Participation of Community, Information Technology, The Role of Village Officials, Accountability of Village Financial Management*

## **PENDAHULUAN**

Adanya otonomi desa menjadikan kekuatan untuk pemerintah desa dalam mengurus, mengatur dan menyelenggarakan, dan mempertanggungjawabkan dalam pengelolaan keuangan desa (Gayatri, Latrini, & Widhiyani, 2017). Desa memiliki tugas dan tanggungjawab yang harus diembannya dalam pengelolaan keuangan desa yang berasal dari alokasi dana desa tersebut. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa yaitu untuk pemerataan pembangunan dengan pemberian alokasi dana desa diantara daerah pedesaan dengan di daerah perkotaan dan untuk pelayanan masyarakat. Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ini, pemerintah pusat memberikan alokasi dana desa kepada semua desa di Indonesia. Alokasi dana desa yang jumlahnya sangat fantastis berasal dari APBN yaitu sebesar Rp 20,76 triliun yang dicairkan pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 46,9 triliun yang dicairkan (Astini, Fauzi, & Widowati, 2019). Dengan adanya peningkatan alokasi dana desa secara nasional, maka di Kabupaten Bantul juga terdapat peningkatan jumlah alokasi dana desa sebesar 10 persen, dari Rp 79 miliar menjadi Rp 98 miliar (amg, 2019). Alokasi dana desa ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pembangunan di pedesaan agar pembangunan dapat merata (Astini et al., 2019).

Pemberian dana desa yang ditujukan untuk pembangunan dan adanya aturan tentang pengelolaan alokasi dana desa belum terealisasi dengan baik dan benar, terlihat dari penyalahgunaan dana desa yang dikhususkan untuk pembangunan di Bantul, yaitu adanya penggelapan dana proyek pembangunan senilai Rp 306,959 juta dengan total 17 proyek (Wijaya, 2019). Dengan adanya hal ini akan mengakibatkan terhambatnya kegiatan pembangunan. Dalam semua kegiatan pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan asas akuntabilitas, asas transparansi dan asas partisipasi. Asas akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sangat penting untuk tercapainya pengelolaan keuangan desa sesuai dengan tujuan dan aturan.

Madiasmo, (2002) menyatakan bahwa akuntabilitas dalam sektor publik merupakan kewajiban bagi seseorang yang diberikan perintah untuk bertanggungjawab, memberikan dan menjalankan semua kegiatan yang merupakan tugasnya kepada pihak yang memberi amanat. Hal ini, sejalan dengan teori Stewardship, dimana aparatur desa yang diberi amanah tidak berfokus pada kepentingannya sendiri, tetapi berfokus pada hasil utama dari kepentingan organisasinya (Donaldson & Davis, 1991). Artinya, aparatur desa yang diberi amanah untuk mengelola keuangan desa dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab tanpa adanya paksaan dari siapapun. Umami & Nurodin (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Peneliti ini mengacu pada penelitian Mada et al. (2017) dengan variabel kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini terdapat penambahan variabel teknologi informasi dan peran perangkat desa. Variabel peran perangkat desa ditambahkan dalam penelitian ini, karena sebaik apapun kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi dan adanya partisipasi masyarakat, apabila perangkat desa tersebut tidak menyadari akan tugasnya maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tidak akan tercapai dengan baik (Indrianasari, 2017), serta masih terbatasnya penelitian mengenai peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Untuk penambahan variabel teknologi informasi dikarenakan teknologi informasi dapat mempermudah pekerjaan dan memiliki keakuratan informasi serta ketepatan hasil sehingga dapat mengurangi kesalahan yang disengaja maupun tidak (Aulia, 2018). Variabel teknologi informasi dirasa penting karena informasi yang dihasilkan memiliki keakuratan dan dapat dipertanggungjawabkan seperti yang disebutkan dalam Pemendagri nomor 113 tahun 2014, dimana untuk tercapainya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, maka harus memiliki sarana yang dapat dipertanggungjawabkan (Aulia, 2018). Penelitian ini dilakukan guna memperdalam pengaruh kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, teknologi informasi dan peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa di wilayah Kabupaten Bantul. Penelitian sebelumnya mengenai akuntabilitas

pengelolaan keuangan desa dilakukan pada tahun 2017 dan pengambilan sampel dilakukan di Kabupaten Gorontalo, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul. Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini diberi judul: “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Teknologi Informasi dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”.

## **TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **Teori Stewardship**

Teori stewardship adalah sebuah teori yang menggambarkan keadaan manajemen yang berfokus pada hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi tidak hanya termotivasi oleh tujuan individu mereka (Donaldson & Davis, 1991). Teori ini merupakan teori yang dari awal dibuat untuk manajemen yang bertindak sebagai steward agar termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan principal. Teori ini lebih didesain agar aparatur desa sadar akan tanggungjawab yang diberikan oleh prinsipal/masyarakat kepadanya tanpa adanya motivasi berkerja untuk tujuan-tujuan individu.

### **1. Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Kompetensi aparatur desa yang baik dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan peraturan yang ada, hal ini sejalan dengan teori stewardship dimana aparatur desa berlaku sebagai pelayan yang berkewajiban untuk melayani masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas, sehingga dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan desa dapat menghasilkan keputusan dan pelayanan yang terbaik sebagaimana tugas seorang aparatur desa. Seorang aparatur pemerintah desa seharusnya memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai dengan bidangnya dalam mengelola keuangan desa. Apabila kompetensi aparatur desa minim, maka hal tersebut dapat menghambat tercapainya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Minimnya kompetensi dan evaluasi akan mengakibatkan ketidaksesuaian dan tidak mencerminkan pengelolaan keuangan

desa yang akuntabel. Dari uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

**H1:** Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

## **2. Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Aparatur bertugas untuk melayani publik merupakan suatu tindakan yang dilandasi rasa tanggungjawab kepada pihak yang memberi wewenang. Astini et al. (2019) Rasa tanggungjawab ini merupakan bentuk dari komitmen aparatur terhadap organisasi, dan termasuk bentuk dari akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Aparat yang baik mengutamakan tujuan organisasi dan menjunjung tinggi komitmen organisasi, karena aparat merasa menjadi suatu bagian dari organisasi (Mada et al., 2017). Komitmen organisasi adalah bentuk keyakinan yang dimiliki aparatur desa terhadap organisasi, dan memiliki tekad untuk mencapai sasaran dari organisasi. Aparatur desa yang memiliki komitmen yang tinggi akan mempengaruhi kinerjanya dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga akan mendorong tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dari uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

**H2:** Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

## **3. Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Beierle (1999) menyatakan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat menghasilkan keputusan yang baik sesuai harapan masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi pertimbangan pengambilan keputusan, dimana keputusan yang diambil harus ada partisipasi dari masyarakat dikarenakan dalam pengelolaan keuangan desa, aparatur harus mengutamakan harapan dan kebutuhan masyarakat. Pada teori stewardship menjelaskan bahwa aparatur desa adalah prinsipal yang bertugas memberikan pelayanan terbaik dan sesuai harapan masyarakat. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan semakin banyak individu yang terlibat dalam pengambilan

keputusan, sehingga akan semakin tinggi rasa tanggungjawab aparat untuk melaksanakan hasil keputusan yang telah diambil, hal ini akan menjadikan pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Dari uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

**H3:** Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

#### **4. Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dana desa yang cukup besar menjadikan jumlah laporan yang cukup beragam dan adanya hal kritis dalam pengelolaan keuangan desa dan aparatur desa dituntut akan tanggungjawabnya dalam pengelolaan keuangan desa ini. Dalam pengelolaan keuangan desa harus sesuai prinsip akuntabel, sehingga disetiap akhir kegiatan dalam penggunaan dana desa harus dipertanggungjawabkan oleh aparat pengelola keuangan desa kepada masyarakat desa. Pada teori Stewardship dapat dijelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi oleh aparatur desa akan membantu dalam hal pengelolaan keuangan desa, sehingga aparatur desa dapat dengan mudah menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat agar dapat terwujud akuntabilitas. Adanya teknologi informasi harus dimanfaatkan secara maksimal dalam pengelolaan keuangan desa, karena dengan menggunakan teknologi informasi akan memberikan kemudahan kepada aparatur desa dalam mengelola keuangan sehingga hasilnya akan akurat dan pelayanan publik akan lebih mudah tersampaikan kepada masyarakat, hal ini akan menunjukkan pula bahwa pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Dari uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

**H4:** Teknologi informasi desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

#### **5. Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

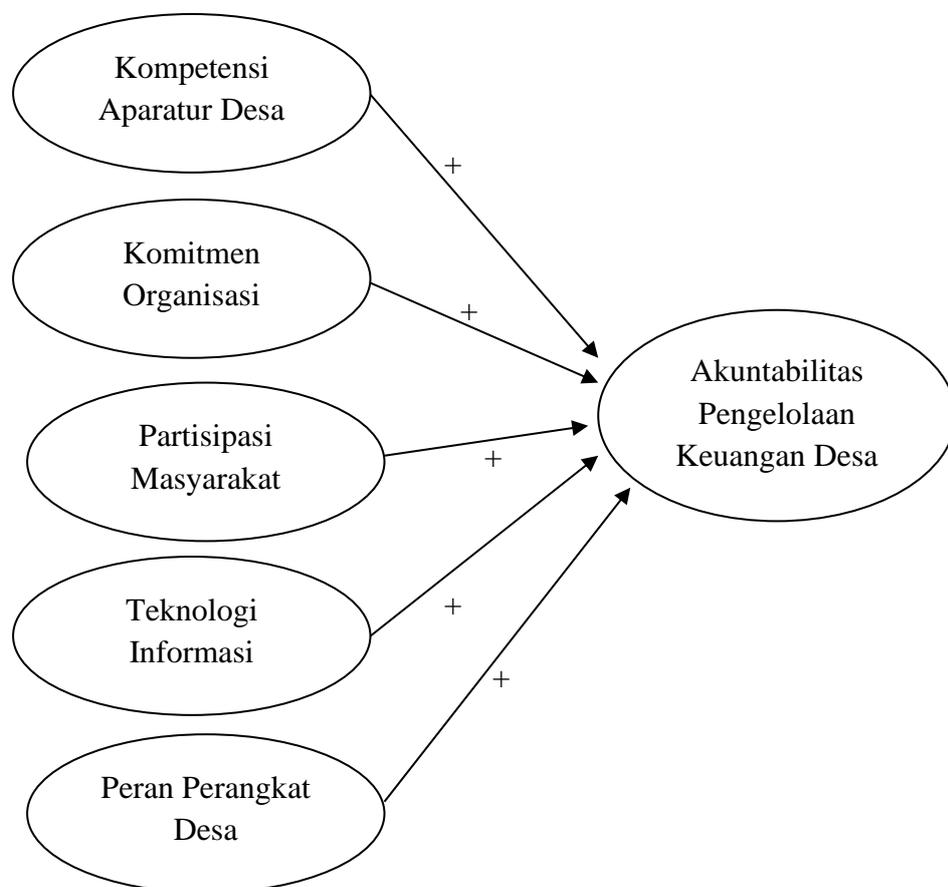
Perangkat desa yang merupakan salah satu faktor pelaku desa memiliki peran penting dalam memajukan bangsa melalui pemerintah desa (Indrianasari, 2017). Perangkat desa memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan akuntabilitas

pengelolaan keuangan desa dan dalam memajukan masyarakat. Perangkat desa dalam melaksanakan tugas, kewajiban hak dan kewenangannya harus sesuai dengan peraturan yang ada tentang pengelolaan keuangan desa dengan begitu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa akan tercapai dengan baik. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa akan membuat perangkat desa lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya yang berasal dari masyarakat. Tanpa adanya peran dari aparat desa maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tidak akan tercapai. Dari uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

**H5:** Peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Model penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1. Model Penelitian**



## **Metode Penelitian**

### **A. Objek atau subjek penelitian**

Objek pada penelitian ini adalah Kantor Balai Desa di Kabupaten Bantul dengan populasi sebanyak 75 desa, dan penelitian ini menggunakan 75 sampel desa. Subjek dalam penelitian ini adalah aparatur pengelola keuangan desa di Kabupaten Bantul yang menjadi responden dari penelitian ini.

### **B. Jenis data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dapat dikelompokkan dalam data kuantitatif. data primer adalah data yang didapatkan secara langsung tanpa perantara. Data ini diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang dibagikan ke responden.

### **C. Teknik pengambilan sampel**

Dalam pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik probabilitas sampling. Probabilitas sampling adalah sebuah teknik yang memberi peluang kepada setiap anggota populasi untuk menjadi anggota sampel. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 75 desa dengan responden yang terdiri dari kepala desa, bendahara, dan sekertaris sehingga jumlah responden dari penelitian ini sebanyak 225 aparatur desa.

### **D. Teknik pengumpulan data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada aparatur desa yang ada di Kabupaten Bantul. Pertanyaan yang dicantumkan dalam kuesioner berisikan tentang kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, teknologi informasi dan peran perangkat desa. Jawaban kuesioner dibatasi dengan skala likert yaitu skala 1-5 berdasarkan tingkat kesetujuan dari responden.

### **E. Definisi operasional variabel penelitian**

#### **1. Variabel Dependen**

### **a. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber dan melaksanakan kebijakan yang diberikan kepada entitas pelaporan untuk mencapai tujuan entitas yang telah ditetapkan dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi: perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa (Nafidah & Anisa, 2017). Pengukuran variabel akuntabilitas atau kualitas laporan keuangan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Rosyidi (2018), yang terdiri dari 10 pertanyaan, dengan indikator kejujuran, kesesuaian dengan prosedur, kepatuhan pelaporan dan kepatuhan terhadap aturan/hukum.

## **2. Variabel Independen**

### **a. Kompetensi Aparatur Desa**

Kapasitas adalah kemampuan manusia, masyarakat dan lembaga untuk mencapai keberhasilan, untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan, serta mengubah tujuan berkelanjutan jika diperlukan, kemajuan dan pengembangan (Mouallem & Analoui, 2014). Kapasitas ini merupakan kompetensi atau kemampuan seorang individu dalam melakukan sesuatu terutama dalam pekerjaan dan memiliki pengaruh dalam hasil pekerjaan tersebut. Variabel kapasitas aparatur desa pengukurannya menggunakan kuisisioner yang dikembangkan oleh Medianti (2018) yang terdiri dari 13 pertanyaan dengan indikator pengetahuan, keahlian dan perilaku.

### **b. Komitmen Organisasi**

Menurut Robbins & Judge (2008) komitmen organisasi adalah keyakinan dan dukungan terhadap nilai dan atau sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi, dimana menggambarkan karyawan yang memihak kepada sebuah organisasi, tujuan dan keinginan mempertahankan anggota dalam suatu organisasi. Variabel komitmen organisasi diukur dengan menggunakan kuisisioner yang dikembangkan oleh Medianti, (2018) yang terdiri dari 9 pertanyaan, dengan indikator komitmen afektif, komitmen berkelanjutan dan komitmen normatif.

### **c. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan dalam perencanaan pembangunan dan dalam pengelolaan keuangan desa partisipasi masyarakat harus ada karena keterlibatan masyarakat dari proses penyusunan sampai pengambilan keputusan akan meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh aparatur desa (Indriani, Fahlevi, & Putri, 2019). Pengukuran variabel partisipasi masyarakat dilakukan dengan kuisisioner yang dikembangkan oleh Mada et al. (2017) yang terdiri dari 6 pertanyaan dengan indicator pengambilan keputusan, penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran.

### **d. Teknologi Informasi**

Wilkinson (2000) menyatakan Komputer, database, perangkat lunak, jaringan, electronic commerce dan segala jenis yang berhubungan dengan teknologi adalah termasuk teknologi informasi. Sugiarti & Yudianto (2017) menjelaskan bahwa teknologi informasi sangat penting di era globalisasi seperti sekarang baik bagi organisasi swasta maupun organisasi sektor publik yaitu untuk membantu kegiatan dalam organisasi dengan alasan:

- a. Peningkatan kompleksitas
- b. Pengaruh globalisasi
- c. Dibutuhkannya keefisienan waktu
- d. Adanya persaingan bisnis

Variabel Teknologi Informasi diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Perdana (2018). Kuisisioner ini terdiri dari 5 pertanyaan, dengan indikator sarana, prasarana, dan sasaran tujuan

### **e. Peran Perangkat Desa**

Perangkat desa merupakan aparat desa yang bekerja dibawah pimpinan kepala desa. Perangkat desa yang merupakan salah satu faktor pelaku desa memiliki peran penting dalam memajukan bangsa melalui pemerintah desa (Indrianasari, 2017). Pengukuran variabel peran perangkat desa

menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Indrianasari (2017) yang terdiri dari 7 pertanyaan, dengan indikator sebagai berikut:

- Perencanaan anggaran
- Pengambilan keputusan

Pelaksanaan kegiatan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Statik Deskriptif

**Tabel 4.1**  
Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Jumlah kuesioner	Teoritis		Aktual		
		Kisaran	Mean	Kisaran	Mean	Std. Deviasi
KAD	183	13-65	39	33-65	57,69	4,507
KO	183	9-45	27	25-45	33,20	3,790
PM	183	6-30	18	20-30	25,29	2,245
TI	183	5-25	15	19-25	22,63	2,108
PPD	183	7-35	21	24-35	30,48	2,844
AK	183	10-50	30	33-50	43,40	4,059

### 2. Analisis Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

**Tabel 4.2**  
Hasil Uji Normalitas

One Sample Kolmogorov-Smirnov	Nilai Sig.	Keterangan
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,132	Berdistribusi Normal

Dilihat dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai signifikan dalam uji sampel Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,132, yang artinya nilai tersebut  $> 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

## b. Uji Multikolinearitas

**Tabel 4.3**  
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Colinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
KAD	0,679	1,472
KO	0,881	1,135
PM	0,779	1,283
TI	0,722	1,385
PPD	0,563	1,776

Pada tabel 4.3 dapat dilihat hasil uji multikolinearitas dimana variabel kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, teknologi informasi dan peran perangkat desa memiliki nilai VIF < 10, dan seluruh variabel memiliki nilai tolerance > 0,01. Hal ini dapat dikatakan bahwa model penelitian yang digunakan tidak terdapat multikolinearitas.

## c. Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4.4**  
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Nilai Sig.	Keterangan
KAD	0,277	Tidak terkena heteroskedastisitas
KO	0,595	Tidak terkena heteroskedastisitas
PM	0,307	Tidak terkena heteroskedastisitas
TI	0,084	Tidak terkena heteroskedastisitas
PPD	0,467	Tidak terkena heteroskedastisitas

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai sig. pada variabel kompetensi aparatur desa sebesar 0,277, variabel komitmen organisasi sebesar 0,595, variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,307, variabel teknologi informasi 0,084, dan untuk variabel peran perangkat desa sebesar 0,467. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan kelima variabel diatas > 0,05, yang artinya data yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3. Pengujian Hipotesis

#### a. Hasil Uji F

**Tabel 4.5**  
Hasil Uji-F

	<b>Model</b>	<b>F</b>	<b>Sig.</b>
1	Regression	45,731	0,000(a)

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa hasil signifikan uji F  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, teknologi informasi, dan peran perangkat desa secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

#### b. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R-square)

**Tabel 4.6**  
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	Adjusted R Square
1	0,551

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan nilai adjusted r square sebesar 0,551 atau 55,1%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, teknologi informasi dan peran perangkat desa mampu menjelaskan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai variabel dependen sebesar 55,1%. Sedangkan 44,9% sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### c. Hasil Uji T

**Tabel 4.7**  
Hasil Uji-T

Model	Unstandardized Coefficients (B)	Sig.
1 (Constant)	1,888	,569
KAD	,109	,045
KO	,126	,028

PM	,096	,345
TI	,197	,081
PPD	,792	,000

Pada tabel 4.7 diatas menunjukkan persamaan regresi pada penelitian ini sebagai berikut:

**Uji Hipotesis 1: Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama (H1) yaitu pada variabel kompetensi aparatur desa menunjukkan adanya pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang artinya semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh aparat desa maka akan memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mada et al., (2017); Medianti, (2018); Rosyidi, (2018) yang menunjukkan apabila semakin rendah kompetensi aparatur pemerintah desa maka akan menghambat pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

Adanya kompetensi yang tinggi maka aparatur desa akan lebih memiliki rasa tanggung jawab dengan tugas yang diemban. Hal ini sesuai dengan teori stewardship, dimana aparatur desa yang berlaku sebagai pelayan harus memiliki kemampuan atau kompetensi yang memadai, sehingga pada saat melayani masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan desa aparatur desa dapat sesuai dengan tujuan dan aturan yang ada pada instansi. Dilihat dari hasil jawaban kuesioner yang dibagikan kepada responden yang memiliki 3 indikator pertanyaan menunjukkan bahwa aparatur desa di Kabupaten Bantul memiliki pengetahuan dan keahlian yang cukup baik dalam pengelolaan keuangan desa. Sikap/perilaku aparatur desa sangat baik dan dapat menanggapi tuntutan dari masyarakat dalam melayani pengelolaan keuangan desa.

## **Uji Hipotesis 2: Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Hasil uji hipotesis kedua (H2) yaitu variabel komitmen organisasi menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mada et al., (2017); Medianti, (2018); dan Aulia, (2018) yang menyatakan bahwa keberhasilan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan wujud dari komitmen dari aparatur desa dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa.

Pada teori *stewardship*, aparatur desa adalah sebagai pelayan bagi masyarakat sehingga ketika aparat memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasinya maka mereka akan menunjukkan kepeduliannya dan berusaha untuk mencapai tujuan dari organisasi. Dilihat dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada responden menunjukkan bahwa aparatur desa memiliki komitmen berupa rasa tanggung jawab terhadap organisasinya untuk mencapai tujuan organisasi dan sebagian besar aparatur desa tetap ingin memertahankan pekerjaannya di organisasi ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa indikator komitmen afektif, komitmen lanjutan dan komitmen normatif dimiliki oleh aparatur desa di Kabupaten Bantul.

## **Uji Hipotesis 3: Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Uji hipotesis yang ketiga pada variabel partisipasi masyarakat melalui analisis statistik menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang positif antara partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriani et al. (2019); Aulia (2018); dan Medianti (2018) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi dari masyarakat maka akan semakin akuntabel pengelolaan keuangan desa.

Ditolaknya hipotesis ketiga yaitu menunjukkan tidak adanya keselarasan dengan teori *stewardship*. Dalam teori *stewardship*

menjelaskan bahwa aparat desa adalah principal yang bertugas melayani rakyat dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga dengan adanya partisipasi masyarakat itu kan membantu pengambilan keputusan dalam hal pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Hal ini bertolak belakang dengan keadaan di Kabupaten Bantul. Hasil uji hipotesis yang didapatkan menunjukkan masih kurangnya partisipasi masyarakat di Kabupaten Bantul, dikarenakan masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa. Partisipasi masyarakat yang dipahami aparat desa di Kabupaten Bantul adalah dengan melibatkan badan permusyawaratan desa, bukan masyarakat secara umum. Dilihat dari jawaban yang didapatkan dari kuesioner yang dibagikan kepada responden menunjukkan bahwa masyarakat tidak berperan dalam penyusunan anggaran, pengambilan keputusan dan pelaksanaan anggaran dalam pengelolaan keuangan desa.

#### **Uji Hipotesis 4: Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) pada variabel teknologi informasi menunjukkan tidak adanya pengaruh yang positif terhadap tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang berarti semakin tinggi atau rendahnya penggunaan teknologi informasi tidak memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yadnya et al. (2017); dan Aulia (2018) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi maka proses pengelolaan keuangan desa akan memiliki hasil yang akuntabel dan transparan.

Ditolaknya hipotesis keempat bertolak belakang dengan teori stewardship. Pada teori stewardship menjelaskan bahwa dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi yang tinggi oleh aparat desa akan membantu dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga aparat desa

dapat dengan mudah menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat agar dapat terwujud akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil jawaban responden di Kabupaten Bantul tidak mencerminkan bahwa tingginya pemanfaatan teknologi informasi akan memengaruhi tercapainya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Dilihat dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada responden menunjukkan bahwa sarana dan prasarana untuk menunjang pekerjaan terpenuhi namun, aparat desa tidak dapat memanfaatkan sarana yang ada secara maksimal untuk mencapai sasaran tujuan.

#### **Uji Hipotesis 5: Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada variabel peran perangkat desa menunjukkan adanya pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang artinya semakin tinggi peran dari perangkat desa maka akan memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrianasari (2017); dan Yesinia et al. (2018) yang menunjukkan apabila semakin tinggi peran perangkat desa maka semakin tinggi pula tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan sampai pelaporan dan pertanggungjawaban harus dilakukan oleh perangkat desa. Tanpa adanya peran perangkat desa yang memiliki rasa tanggungjawab atas tugas yang diberikan maka pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan dengan lancar sesuai dengan Pemandagri No.113 Tahun 2014. Hal ini sejalan dengan teori stewardship yang menyatakan bahwa rasa tanggungjawab perangkat desa akan berpengaruh terhadap kinerja, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa semua aparatur desa berperan secara penuh dalam perencanaan anggaran, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa.

## **KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
3. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
4. Teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
5. Peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

### **Keterbatasan**

Adapun penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan, antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan metode survei yaitu kuesioner tanpa menggunakan metode wawancara, sehingga hasil dari penelitian ini belum menjelaskan secara detail mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2. Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini masih menggunakan kuesioner terdahulu yang mungkin terdapat kekeliruan.
3. Dari 75 desa yang digunakan sebagai sampel penelitian, masih terdapat beberapa kantor balai desa yang menolak untuk mengisi kuesioner.

### **Saran**

1. Saran Untuk Praktisi
  - a. Pemerintah desa sebaiknya lebih menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek pengelolaan keuangan desa.
  - b. Memberikan perhatian kepada aparatur desa terkait tanggung jawabnya terhadap organisasi, seperti memberikan penghargaan kepada aparatur desa.

## 2. Saran secara Teoritis

- a. Peneliti berharap dalam penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel yang masih jarang diteliti sebelumnya dan menggunakan variabel intervening atau variabel moderasi untuk melihat pengaruhnya.
- b. Untuk penelitian selanjutnya mungkin bisa melengkapi penelitian dengan metode wawancara agar mendapatkan tingkat keseriusan jawaban dan lebih detail sehingga dapat menjelaskan mengenai pengaruh variabel independen yang digunakan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- amg. (2019). Dana Desa di Bantul Naik Jadi Rp 98 Miliar pada 2019 - Tribun Jogja. Retrieved July 2, 2019, from tribun Jogja.com website: <https://jogja.tribunnews.com/2018/12/27/dana-desa-di-bantul-naik-jadi-rp-98-miliar-pada-2019>
- Astini, Y., Fauzi, A. K., & Widowati. (2019). Determinan yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa. *Valid Jurnal Ilmiah*, 16, 29–47.
- Aulia, P. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Riau*, 1(3).
- Beierle, T. C. (1999). Using social goals to evaluate public participation in environmental decisions. *Review of Policy Research*, 16(3–4), 75–103. <https://doi.org/10.1111/j.1541-1338.1999.tb00879.x>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: *Australian Journal of Management*, 16(1)(June 1991), 49–66.
- Gayatri, Latrini, M. Y., & Widhiyani, N. L. S. (2017). Trasnparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(2), 175–182.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Kuangan Desa (Studi pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Assets Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan Dan Pajak*, 1, 29–46.
- Indriani, M., Fahlevi, H., & Putri, S. (2019). Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 111–130.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa , Komitmen Organisasi Pemerintah Desa , dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115.
- Medianti, L. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Riau*, 1(Dd), 1–13.
- Mouallem, L. El, & Analoui, F. (2014). The Need for Capacity Building in Human Resource Management Related Issues: A Case Study From the Middle East (Lebanon). *European Scientific Journal*, 1(June), 245–254.

- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Perdana, K. W. (2018). *Lampiran 1. Surat-surat Penelitian*.
- Rosyidi, M. (2018). Pengaruh Transparansi, Kompetensi dan sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Riau*, 1, 1–14.
- Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan Teknologi Informasi , dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari , Kecamatan Karawang Timur , Kecamatan Majalaya. *Proceedings*, 580–590.
- Umami, R., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6, 74–80.
- Wijaya, S. (2019). Kejari Bantul Diminta Usut Proyek Dana Desa. Retrieved July 2, 2019, from Koran Bernas website: <https://www.koranbernas.id/berita/detail/kejari-bantul-diminta-usut-proyek-dana-desa>
- Yadnya, N. W. A., Yuniarta, G. A., & Sinarwati, N. K. (2017). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 1.
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Riset*, 10(1), 105–112.

